

ABSTRAK

Landi Iskandar: “Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kab Bandung dihubungkan Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak positif bagi pemerintahan desa dalam menjalankan kebijakan otonomi desa khususnya dalam pembentukan peraturan desa. Salah satunya yaitu harmonisasi dalam pembentukan peraturan desa antara kepala desa dengan BPD terutama dalam pembahasan dan kesepakatan pembentukan peraturan desa. Namun pada implementasinya, dalam pembentukan peraturan desa masih terdapat hambatan dan permasalahan terutama pada proses pembentukan peraturan desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Otonomi Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembentukan peraturan Desa lalu dihubungkan dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori otonomi daerah yang menjelaskan mengenai kesempatan daerah mengatur urusan pemerintahan, otonomi Desa membahas mengenai kewenangan desa dalam mengatur urusan pemerintahan desa, teori kebijakan publik yaitu terdapat empat konsep yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan melihat undang-undang atau aturan tentang pembentukan Peraturan Desa lalu di lihat secara empiris dimana studi lapangan dilakukan guna melihat langsung apakah sudah diimplementasikan atau belum. Data primer yang digunakan yaitu Undang-undang sedangkan data sekunder berupa buku dan literatur lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa disebagian Desa dalam pembentukan Peraturan Desa belum mengimplementasikan proses pembentukan peraturan Desa secara komprehensif. Kemudian kendala yang dihadapi pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Cileunyi ialah dalam proses pembentukan Peraturan Desa mengalami kesulitan mengenai sosialisasi terhadap masyarakat karena berbagai hal, kemudian BPD yang berlatar belakang pendidikan juga pekerjaan yang beda-beda, sehingga tingkat kepedulian terhadap tupoksi sebagai BPD kurang maksimal. Lalu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu dengan mengedukasi masyarakat, juga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ialah harus adanya pengarahan tentang tugas dan fungsi BPD dalam proses pembentukan peraturan Desa.

Kata Kunci : *Otonomi Daerah, Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa*

ABSTRACT

Landi Iskandar: "Implementation of the Village Autonomy Policy in the Formation of Village Regulations in the Cileunyi District, Bandung Regency is linked to Law No. 6 of 2014 concerning Villages"

The establishment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has had a positive impact on village governments in implementing village autonomy policies, especially in the formation of village hundreds. One of them is harmonization in the formation of village regulations between the village head and the BPD, especially in discussions and agreements on the formation of village regulations. However, in its implementation, in the formation of village regulations there are still obstacles and problems, especially in the process of forming village regulations.

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Village Autonomy Policy in the formation of Village Regulations in the Cileunyi District, Bandung Regency, to find out and analyze the obstacles faced in the Formation of Village Regulations in Cileunyi District, Bandung Regency and to find out and analyze the efforts made in overcoming obstacles in The process of forming Village regulations is then linked to Law 6 of 2014 concerning Villages. This thesis is based on several theories including: regional autonomy theory which explains regional opportunities to regulate government affairs, Village autonomy discusses village authority in managing village government affairs, public policy theory, namely four concepts that really determine the success of implementing a policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. And the theory of the formation of statutory regulations which explains the principles in drafting statutory regulations. This research was carried out using empirical juridical legal research methods, namely by looking at the laws or regulations regarding the formation of Village Regulations and then looking at them empirically where field studies were carried out to see directly whether they had been implemented or not. The primary data used is laws, while the secondary data is books and other literature.

Based on the research results, the author concludes that in some villages in forming Village Regulations they have not implemented the process of forming Village regulations comprehensively. Then the obstacle faced by the Village government in the Cileunyi District area is that in the process of forming Village Regulations they experienced difficulties regarding socialization to the community due to various reasons, then BPD who had different educational backgrounds and jobs, so the level of concern for their main duties as BPDs was less than optimal. Then the efforts made by the Village government are to educate the community, also the efforts that must be made by the Bandung Regency government are to provide direction regarding the duties and functions of the BPD in the process of forming Village regulations.

Keywords: *Regional Autonomy, Policy Implementation, Village Regulations*